

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN  
2025



**DISHUB**  
PACITAN



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan  
[www.dishub.pacitankab.go.id](http://www.dishub.pacitankab.go.id)  
[dishub@pacitankab.go.id](mailto:dishub@pacitankab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya pelayanan perhubungan yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Pacitan, Januari 2026

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**Ir. BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt., M.M, IPU**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680920 199901 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. STRUKTUR ORGANISASI .....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI .....	6
C. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .....	7
D. CASCADING KINERJA .....	8
E. PETA PROSES BISNIS.....	10
F. RINGKASAN HASIL EVALUASI .....	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS .....	14
B. RENCANA KERJA 2025.....	24
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	25
D. PERJANJIAN KINERJA 2025.....	36
BAB III.....	412
AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	43
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	522



3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD .....	56
3.4	Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional .....	57
3.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan .....	60
3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
3.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	74
3.8	REALISASI ANGGARAN.....	101
BAB IV_PENUTUP .....		110
A.	Kesimpulan.....	110
B.	RENCANA TINDAK LANJUT .....	111



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.....	14
Tabel 1.2	Tindak Lanjut Evaluasi.....	12
Tabel 2.1	Visi dan Misi Bupati Pacitan .....	16
Tabel 2.2	Matriks Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ...	18
Tabel 2.3	Penyelarasan Tujuan Dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, Dan Penetapan Target .....	20
Tabel 2.4	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.5	Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan .....	24
Tabel 2.6	Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja ....	25
Tabel 2.7	Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan .....	26
Tabel 2.8	Perjanjian Kerja Kepala Dinas Perhubungan.....	36
Tabel 2.9	Perjanjian Kerja Sekretaris Dinas Perhubungan ...	37
Tabel 2.10	Perjanjian Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan.....	38
Tabel 2.11	Perjanjian Kerja Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan .....	39
Tabel 2.12	Perjanjian Kerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan.....	39
Tabel 2.13	Perjanjian Kerja Kepala Bidang Prasarana dan Transportasi Dinas Perhubungan .....	40
Tabel 2.14	Perjanjian Kerja Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan ....	41
Tabel 2.15	Perjanjian Kerja Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.....	41
Tabel 3.1	Standar Pencapaian Kinerja .....	42
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	43



Tabel 3.2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.....	51
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya .....	53
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD .	56
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Nasional .....	59
Tabel 3.7	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang dilakukan .....	60
Tabel 3.8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya....	65
Tabel 3.9	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.....	71
Tabel 3.10	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan pangkat .....	71
Tabel 3.11	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan jabatan .....	72
Tabel 3.12	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan.....	72
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Tahun 2025 Tujuan, Sasaran dan Program .....	75
Tabel 3.14	Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.....	103
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.....	104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-202 .....	8
Gambar 1.2	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 .....	8
Gambar 1.3	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 .....	9
Gambar 1.4	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 .....	9
Gambar 1.5	Peta Proses Bisnis .....	10
Gambar 3.1	Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.....	91
Gambar 3.2	Pemeliharaan Rambu, Warning Light dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah .....	101
Gambar 3.3	Pemasangan Meterisasi dan Pemeliharaan PJU Kabupaten Pacitan.....	101
Gambar 3.4	Pengamana Kawasan Tertib Lalu Lintas, Pengamanan Natal & Tahun Baru dan Apel Patuh Semeru 2025 .....	102
Gambar 3.5	Pengujian Kendaraan Bermotor.....	102



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

##### **a. Kepala Dinas;**

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

##### **b. Sekretariat**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
2. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;



**c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perparkiran.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen lalu lintas dan angkutan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perparkiran;
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Seksi Perparkiran; dan

**d. Bidang Prasarana Transportasi**

Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang



meliputi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi, dan Penerangan Jalan Umum.

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang prasarana transportasi terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan

**e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi**

Bidang Pengembangan Pengendalian Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian dan keselamatan transportasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan



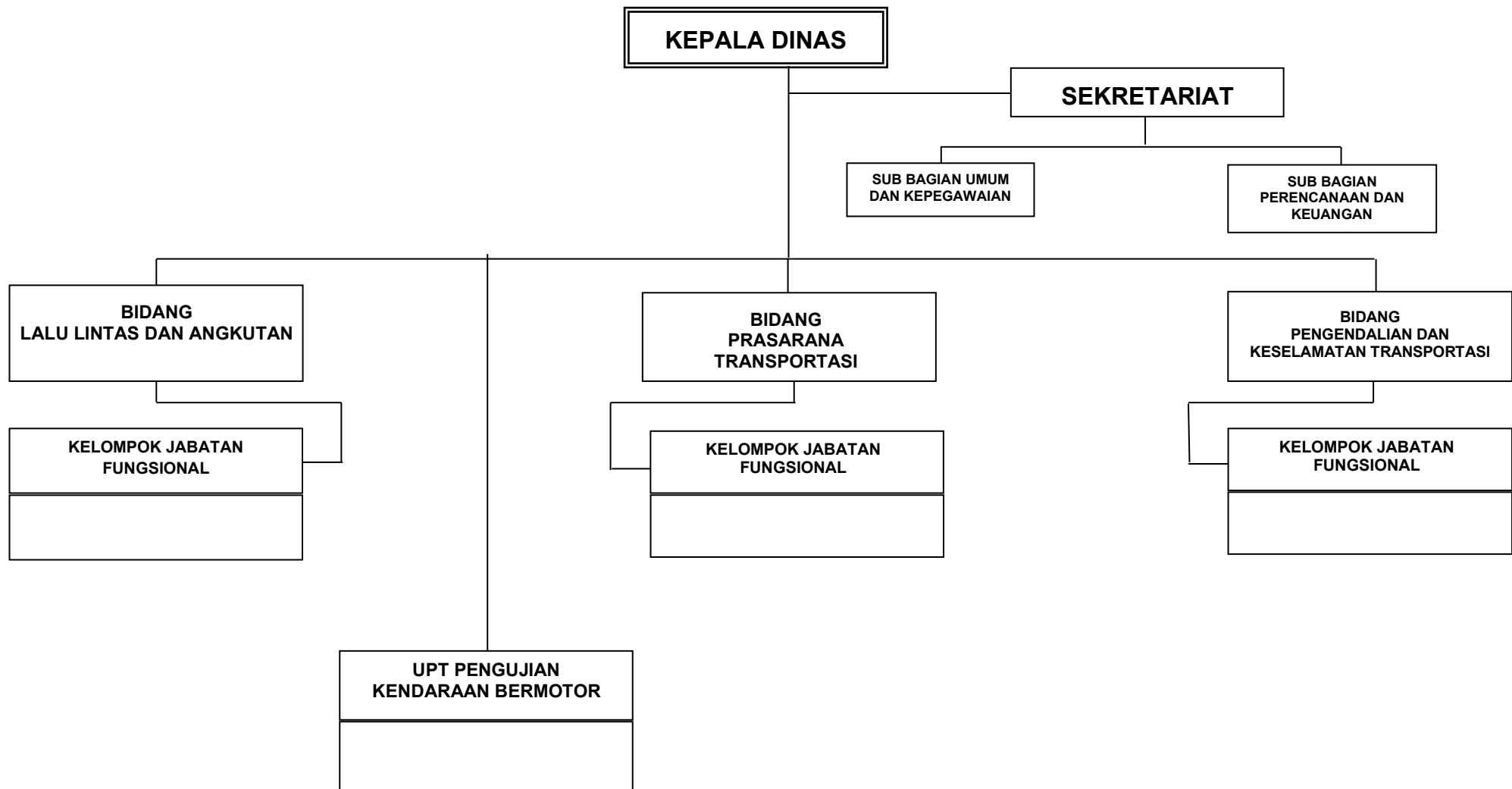
Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Transportasi;
  - b. Seksi Seksi Bimbingan Keselamatan Pepaduan Moda dan Teknologi Transportasi; dan
- f. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**





## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Guna mengakomodasi implikasi dan berbagai ketentuan agar penyelenggaraan transportasi dapat berperan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang Pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dibentuk Dinas Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.

### **2. Fungsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan keselamatan transportasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### C. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perhubungan sebagai berikut:

Dari beberapa hal tersebut di atas, maka permasalahan dan isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurang optimalnya Pelayanan Bidang perhubungan	• Optimalisasi Pelayanan Bidang Perhubungan
2	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana publik bidang perhubungan	• Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
3	Kecelakaan Lalu Lintas masih tinggi	• Manajemen lalu lintas yang berkeselamatan
4	Kurang optimalnya kelaikan pengoperasian dan pengamanan lalu lintas	• Jalan yang berkeselamatan • Kendaraan yang berkeselamatan
5	Belum optimalnya sistem informasi manajemen transportasi	• Pengguna jalan yang berkeselamatan • Penanganan pra dan pasca terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas



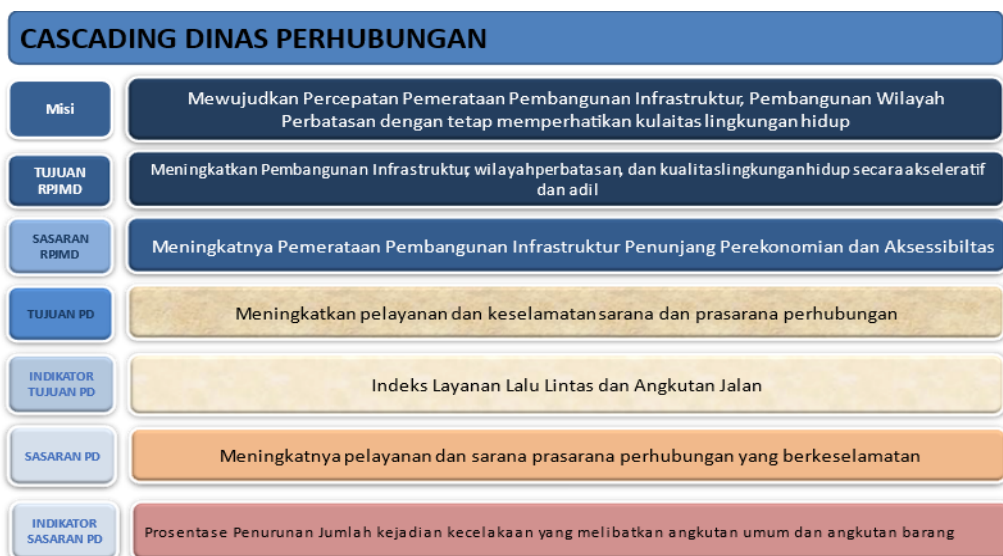
#### D. CASCADING KINERJA

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut :

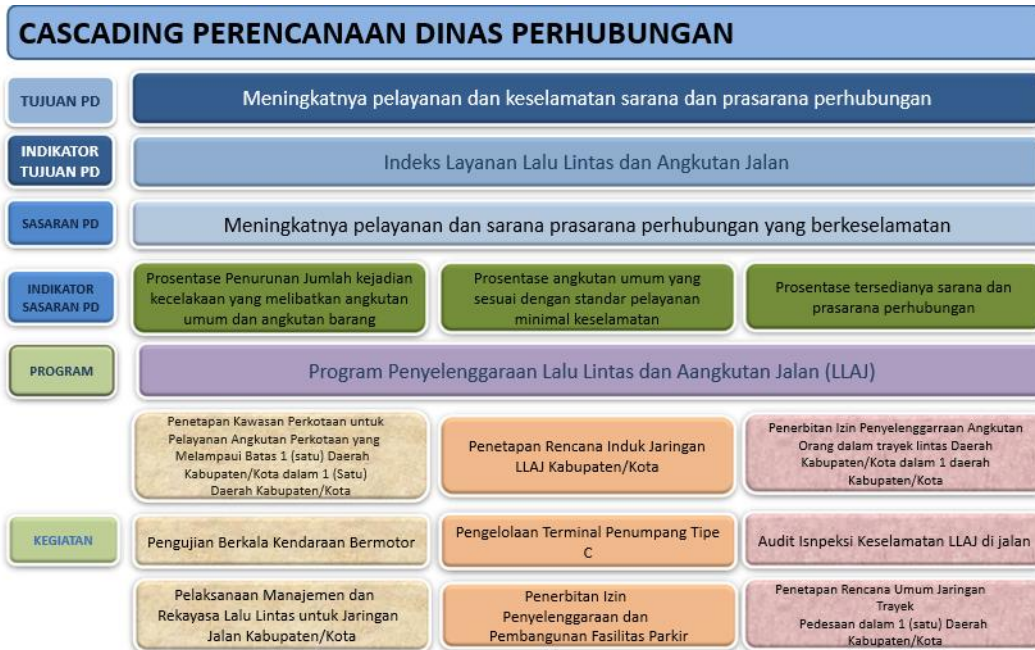


Gambar 1.1 Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

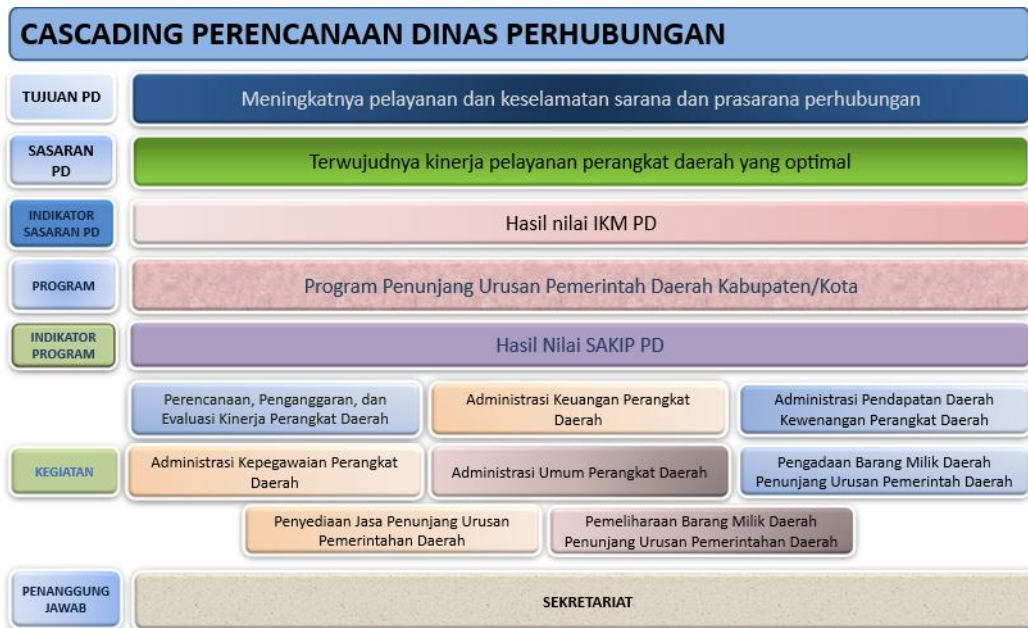
Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026



Gambar 1.3 Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026

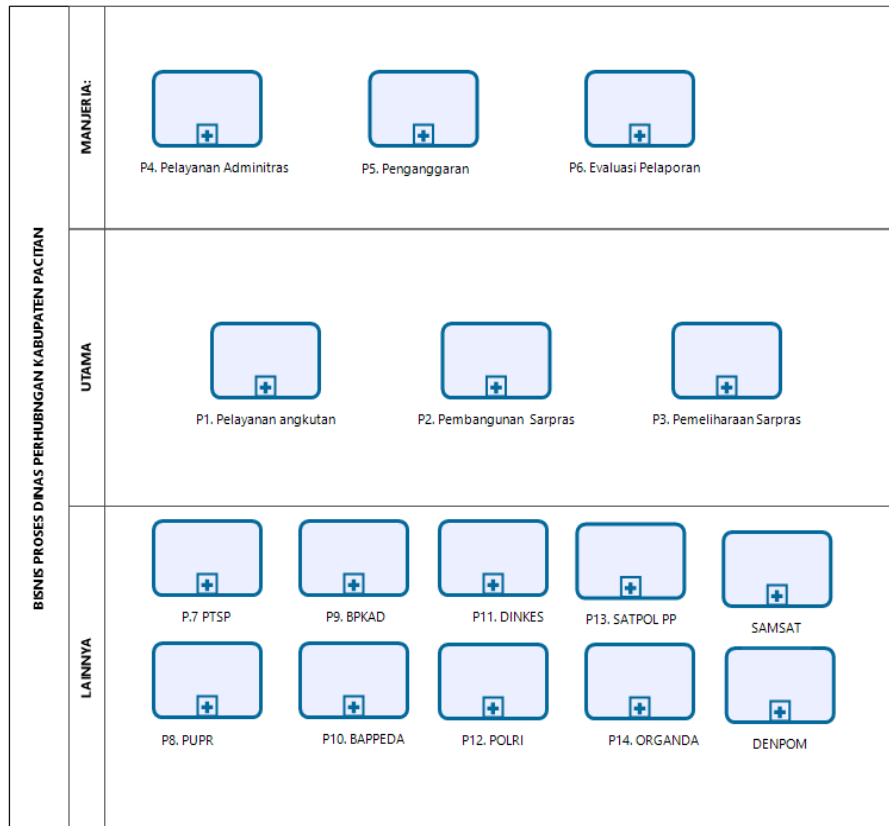


Gambar 1.4 Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026



## E. PETA PROSES BISNIS

### 1. Proses Utama



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis

### PROSES UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 206 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

#### A. Utama



Proses utama ini terdiri dari :

1. Pelayanan Angkutan
2. Pembangunan Prasarana Transportasi
3. Pemeliharaan Prasarana Transportasi

B. Manajerial

Proses manajerial terdiri dari 2 (dua) unsur utama, yaitu :

1. Umum dan Kepegawaian
2. Perencanaan dan Keuangan

C. Lainnya

Proses ini menggambarkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan atau aktifitas yang ada di Dinas Perhubungan. Pihak-pihak lain tersebut adalah :

1. PTSP
2. PUPR
3. BKD
4. BAPPELITDA
5. DINKES
6. POLRI
7. SATPOLPP
8. ORGANDA
9. SAMSAT
10. DENPOM



## F. RINGKASAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 73,55 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Tindak Lanjut Evaluasi**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>
a	Perencanaan Kinerja	30%	22,50
b	Pengukuran Kinerja	30%	18,90
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>70,95</b>

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Menambahkan informasi sasaran, indikator sasaran, dan target pada Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.
- Menyelaraskan sasaran serta indikator sasaran antara Rencana Aksi dengan Perjanjian Kinerja.
- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada media yang dapat diakses publik dan dengan tepat waktu/tidak melewati tahun anggaran.



- d. Dokumen monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2025 agar memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta pemenuhannya atas langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerja selanjutnya.
- e. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada media yang dapat diakses publik.
- f. Menyajikan informasi terkait Analisa atas penyebab target kinerja tidak tercapai serta upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja mencakup penyesuaian aktivitas dan perencanaan kinerja berikutnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis 2021 – 2026 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

#### **1. Visi**

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

**Visi Kabupaten Pacitan:**

**“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”**

**2. M i s i**

**Misi Kabupaten Pacitan:**

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

**Misi 1 :** Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan  
**Misi 2 :** Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui  
**Misi 3 :** Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,  
**Misi 4 :** Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas



antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Perhubungan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Visi dan Misi Bupati Pacitan**

<b>Visi :</b>					
<b>Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA</b>					
<b>Misi ke-1</b>					
Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup					
<b>Tujuan dan Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Identifikasi Permasalahan</b>	<b>Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
				<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil	<p><b>Tujuan :</b></p> <p>Indeks Layanan Lalulintas dan angkutan jalan</p> <p><b>Sasaran :</b></p> <p>1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan</p>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1. Optimalisasi Pelayanan</p> <p>2. Kecelakaan Lalu Lintas</p>	<p>1. Adanya sarana dan prasarana</p> <p>2. SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan</p> <p>3. Pelayanan yang sudah memenuhi standar</p> <p>Dilaksanakan Koordinasi, sosialisasi dan penegakan</p>	<p>1. Sarana dan prasarana kurang memadai</p> <p>2. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi</p> <p>3. Pelayanan yang belum berbasis</p>



	<p>angkutan umum dan angkutan barang</p> <p>2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p> <p>3. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p>			<p>peraturan bidang perhubungan</p>	<p>teknologi informasi</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>
--	--	--	--	-------------------------------------	---

**Tabel 2.2**

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Definisi operasional</b>	<b>Formula</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Kondisi Akhir</b>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas Kualitas layanan meliputi : A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi Responsivitas meliputi ; Produktivitas meliputi : Produktivitas meliputi : A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target Akuntabilitas meliputi : A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar B. Kebijakan yang berpihak	$IKM + \frac{V}{C} \text{rasio} + \text{prosentase} \frac{\text{tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$	26,57%	27,01%



		kepada masyarakat luas Responsibilitas meliputi : A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor			
--	--	---	--	--	--

**Tabel 2.3**

**PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan umum}} \times 100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%



Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sum ber Data	Kondi si Awal	Target					Kondi si Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Rata – rata ( <i>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas</i> )		28,6%	39,1 %	49,7 %	60,3 %	70,9 %	81,5 %	81,5 %
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan $\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$								
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas $\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$								



Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24



**Tabel 2.4**  
**Target Renstra Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan</b>		<b>Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	26,57	26,65	26,74	26,83	26,92	27,01
	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	82.99 %	85.1 %	87.1 %	89.2 %	91.3 %	93.4 %
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0.11 %	0.10 %	0.09 %	0.08 %	0.07 %	0.07 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	28.6 %	39.1 %	49.7 %	60.3 %	70.9 %	81.5 %
	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	79.20	79.99	80.79	81.15	82.42	83.24



**B. RENCANA KERJA 2025**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program kerja Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/focus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

**Tabel 2.5 Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi OPD</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	1. Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana, kelancaran, dan keselamatan jalan 2. Percepatan Penyelesaian Pelabuhan Pacitan 3. Menindaklanjuti wacana pembangunan Bandara Pacitan dan Tempat Bongkar Muat Barang



**C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target renstra :

**Tabel 2.6 Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2025</b>
<b>Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan</b>		<b>Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	%	26,92
	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	91.3%
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0.07 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	70,9%
	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	90.00



Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan**



<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li><li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li><li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ol>



<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
			Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan 2. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang 3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Mutasi dan Promosi ASN 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
				perhubungan		7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
						8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
						9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



**D. PERJANJIAN KINERJA 2025**

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (beserta perubahannya), sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kerja Kepala Dinas Perhubungan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1.1	Presentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,07%
		2.1	Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	91,3%
		3.1	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	70,9%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	1.1	Hasil nilai IKM PD	90.00

Program		Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.831.237.156,-	Rp. 4.674.800.458,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.872.442.500,-	Rp. 1.888.987.500,-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 6.703.679.656,-</b>	<b>Rp. 6.563.787.958,-</b>	

**Tabel 2.9 Perjanjian Kerja Sekretaris Dinas Perhubungan**



<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai sakip Perangkat Daerah	73,55
2	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen
3	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen
5	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%
6	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
7	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
8	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%
9	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah ketentuan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%



Tabel 2.10

Perjanjian Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
6.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
7.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
8.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
9.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 laporan
10.	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit



**Tabel 2.11**  
**Perjanjian Kerja Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 laporan

**Tabel 2.12**  
**Perjanjian Kerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan	100 %
2	Terlaksananya penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen
3	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Laporan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	12 laporan
4	Terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan
5	Terlaksananya persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil	1 kegiatan



	jalan Kabupaten/Kota	Andalalin	
--	----------------------	-----------	--

**Tabel 2.13**  
**Perjanjian Kerja Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 unit
2	Terbangunnya prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	1 unit
3	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	600 unit
4	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah peningkatann sarana dan prasarana perhubungan	4 unit
5	Tersedianya bangunan terminal penumpang tipe c yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	1 unit
6	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (Fasilitas utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 unit



**Tabel 2.14**  
**Perjanjian Kerja Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi**  
**Dinas Perhubungan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan	100 %
2	Terlaksananya Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	12 laporan
3	Terlaksananya rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen

**Tabel 2.15**  
**Perjanjian Kerja Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3350 dokumen
2.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Standar Pencapaian Kinerja**

<b>Nilai %</b>	<b>Pencapaian</b>
> 100%	Sangat baik
85 – 100%	Baik
65 – 84,99%	Cukup
50 – 64,99%	Kurang
< 50,%	Sangat kurang



### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Secara rinci prosentase pencapaian indikator tujuan, sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	26,92	30,54	113,45%	Sangat baik
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	91,30	63,24	69,27%	Kurang



Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,07	1,12	1,600%	Sangat kurang
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	70,90	70,94	100,05%	Sangat Baik
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	90,00	90,64	100,71%	Sangat baik

Capaian Kinerja diatas berdasarkan hasil kegiatan Dinas Perhubungan Pada tahun anggaran 2025. Realisasi tersebut dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026, untuk analisis tersebut akan dijelaskan secara lengkap dibawah ini :

**1. Tujuan Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan**

Indikator Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berdasarkan perhitungan dari IKM ditambah perbandingan Volume kapasitas rasio ditambah presentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan dibagi 3, sebagaimana formulasi berikut :



Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{IKM} + \frac{v}{c} + \text{prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$$

$$\frac{90,64 + 0,27 + 70,94\%}{3} = 30,54\%$$

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang tersaji pada formulasi di atas dapat dilihat bahwa Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan indikator Tujuan tercapai sebesar 113,45%. Tujuan tersebut akan di lakukan analisis per sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

## **2. Sasaran 1 Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan**

- a) Sasaran berdasarkan Indikator Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan Target 91,30% sedangkan capaiannya 63,24% atau 69,27% (tidak memenuhi target). Untuk mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator dengan rumus sebagai berikut :

Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang berstandar pelayanan keselamatan minimal} \times 100}{\text{Jumlah angkutan umum}}$$

$$\frac{425}{672} \times 100 = 63,24\%$$

Persentase angkutan umum yang memenuhi SPM keselamatan belum tercapai karena masih terdapat armada yang tidak laik jalan, kepatuhan uji KIR rendah, serta kurangnya perlengkapan

43



keselamatan kendaraan pencapaian kinerja yaitu tingginya persaingan antara angkutan online dengan angkutan umum, Hal ini karena adanya pergantian system Online Single Submission (OSS) dalam proses pengurusan ijin angkutan sehingga tidak ada angkutan umum yang mengurus perpanjangan ijin angkutan umum.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum maka rencana tindak lanjut antara lain :

- Meningkatkan pelayanan angkutan umum melalui pemeliharaan jaringan trayek menyeluruh
  - Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi SPM keselamatan kepada operator dan pengemudi
  - meningkatkan pengawasan uji KIR, serta melakukan ramp check secara berkala
  - Meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi SPM keselamatan serta mendorong peremajaan armada agar seluruh angkutan umum memenuhi standar keselamatan
  - Pendampingan pengusaha angkutan umum untuk mengurus badan usaha sebagai salah satu syarat membuat ijin trayek di OSS
  - Melaksanakan survey pendataan angkutan umum di Lokasi simpul transportasi
- b) Sasaran berdasarkan indikator Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang

Target 0,07% sedangkan capaiannya 1,07 atau 1.528,57% (melebihi target). untuk mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator dengan rumus sebagai berikut :



Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang tahun sebelumnya} - \text{tahun berjalan}}{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang tahun sebelumnya}} \times 100$$

$$\frac{89 - 88}{89} \times 100 = 1,12\%$$

Berdasarkan hasil capaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang, Penurunan jumlah kecelakaan belum signifikan karena masih rendahnya kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas, kondisi kendaraan yang belum seluruhnya laik jalan, serta kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan keselamatan masih perlu dilakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan terutama angkutan umum dan barang, adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pemeriksaan kelaikan kendaraan (uji KIR) secara berkala dan ketat terhadap angkutan umum dan angkutan barang.
- Meningkatkan pengawasan operasional angkutan umum dan barang di jalan, bekerja sama dengan kepolisian.
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan keselamatan berkendara bagi pengemudi angkutan umum dan barang.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti kelebihan muatan (ODOL), kecepatan berlebih, dan jam kerja pengemudi.
- Mendorong penerapan manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan (safety management system).
- Sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pengemudi dan perusahaan angkutan secara berkelanjutan.



- Melakukan evaluasi dan analisis data kecelakaan secara berkala sebagai dasar kebijakan pencegahan.
- c) Sasaran berdasarkan indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan  
Target 70,90% sedangkan capaiannya 70,94% atau 100,05% (memenuhi target). Untuk mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan rumus sebagai berikut :

Dengan Rumusan :

Rata-rata (presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas)

- Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan

$$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$$

- Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan perlengkapan jalan}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$$

- **Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan**

70,94%

- **Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan**

$$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$$

$$\frac{140}{175} \times 100 = 80,00\%$$

175



➤ **Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas**

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan perlengkapan jalan}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$$

➤  $\frac{60260}{97379} \times 100 = 61,9\%$

Rumus tersebut di fokuskan menjadi rata-rata (presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas). Pada masing-masing formulasi memiliki perhitungan yang berbeda-beda sehingga diambil rata-rata yaitu 61,90%

Upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana dan prasarana perhubungan secara berkala
  - Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
  - Melaksanakan rehabilitasi dan perbaikan fasilitas perhubungan yang rusak atau tidak laik fungsi.
  - Menambah dan melengkapi rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, PJU, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya
  - Meningkatkan kualitas dan kapasitas terminal, halte, pelabuhan, dan fasilitas pendukung transportasi
  - Memperkuat koordinasi lintas OPD serta kerja sama dengan pemerintah provinsi, pusat.
  - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana perhubungan
- 3. Sasaran 2 Perangkat Daerah : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal**



Dalam rangka mencapai indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan IKU yaitu hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Hasil nilai IKM Perangkat Daerah mengacu pada survey secara elektronik melalui <https://sukma.jatimprov.go.id>. Sistem ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code Akuntabel, mudah, cepat dan terintegrasi. Unsur pelayanan yang dianalisis adalah persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.



Gambar 1. Aplikasi Sukma-e Jatim

berdasarkan hasil responden yang diperoleh dari tanggal 2 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan jumlah responden 793 orang. Metode pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SukMa-e Jatim dengan hasil mutu pelayanan dinyatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dengan memperoleh nilai sebesar 90,64 dengan kategori sangat baik dari target 90,00 sehingga capaian untuk hasil nilai IKM 2025 adalah 100,71%.

Dilihat dari indikator kinerja sasaran “**Nilai IKM Perangkat Daerah**” dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut dikategorikan “**Sangat Baik**” karena mencapai rata – rata kinerja 100,71%. Hasil ini diperoleh dari Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

<b>NO</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>Nilai</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>
1	Kesesuaian persyaratan	90.35	Sangat Baik
2	Prosedur pelayanan	90.29	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	90.29	Sangat Baik
4	Biaya / Tarif Pelayanan	99.43	Sangat Baik
5	Produk Pelayanan	90.95	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana Pelayanan	87.67	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana Pelayanan	88.24	Sangat Baik
8	Sarana dan prasarana Pelayanan	99.84	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	86.95	Sangat Baik
<b>NRR Tertimbang</b>		<b>3.63</b>	
<b>NRR IKM Tertimbang</b>		<b>90.64</b>	

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2024 realisasinya 84,20 dari target 81,60, hal ini berarti realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 107,65%, dikarenakan sampling responden lebih banyak dari tahun 2025 dan adanya peralihan pengambilan survei dengan berbasis teknologi informasi sehingga data riil dan lebih obyektif. Pada tahun 2025 ini Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan dengan Nilai 90,00 sedangkan realisasinya adalah 90,64 sehingga capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah 100,71%, dengan capaian kinerja tersebut



indikator sasaran **"Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah"** masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang lebih optimal maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas, terukur, dan mudah dipahami Masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan publik.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan Perangkat Daerah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik agar lebih nyaman, aman, dan ramah disabilitas.
- Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala berbasis indikator kinerja utama (IKU).
- Meningkatkan koordinasi internal dan lintas Perangkat Daerah untuk mempercepat proses pelayanan.
- Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, integritas, dan akuntabilitas.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.

### **3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui tren kinerja perangkat daerah, baik peningkatan maupun penurunan kinerja. Analisis ini menjadi dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.



Secara umum, sebagian besar indikator kinerja pada Tahun 2024 menunjukkan **peningkatan dibandingkan Tahun 2023**, hal ini dipengaruhi oleh perbaikan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang lebih terarah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang mengalami **penurunan atau stagnasi**, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta faktor eksternal lainnya.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	26,74	27,28	102,02%	27,28	28,36	103,96%	26,92	30,54	113,45%
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	87,10	87,14	100,05%	89,20	64,14	71,90%	91,30	63,24	69,27%



Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,09	0,08	88,89%	0,08	1,19	1,485,09%	0,07	1,12	1.600%
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	49,70	49,70	100%	60,30	61,32	101,69%	70,90	70,94	100,05%
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	80.79	81,09	100,37%	81,60	84,20	103,19%	90,00	90,64	100,71%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 disajikan untuk melihat perkembangan dan konsistensi pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis ini juga menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta perbaikan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.



Sasaran 1 meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan Pada urusan perhubungan untuk indikator :

- **Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan**

Pada Tahun 2023 indikator ini mencapai target dengan capaian **100,05%**, namun pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja menjadi **63,24%**. Penurunan ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah armada angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan serta meningkatnya standar penilaian dan pengawasan terhadap pemenuhan SPM keselamatan.

- **Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang**

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan capaian **88,89%**. Namun pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 terjadi peningkatan capaian yang sangat signifikan, masing-masing sebesar **1.485,09%** dan **1.600%**. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program keselamatan transportasi, peningkatan pengawasan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

- **Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan**

Indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Pada Tahun 2023 capaian kinerja mencapai **100%**, meningkat pada Tahun 2024 menjadi **101,69%**, dan tetap optimal pada Tahun 2025 dengan capaian **100,05%**. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan perencanaan.

Sasaran ke 2 Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indikator **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan.



Pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar **100,37%**, meningkat menjadi **103,19%** pada Tahun 2024, dan tetap berada pada kategori sangat baik pada Tahun 2025 dengan capaian **100,71%**. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perbaikan dan mendapatkan respons positif dari pengguna layanan.

Secara umum, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja **mengalami tren peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan**. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian, kondisi tersebut telah menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya guna mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

### **3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD**

Untuk mengetahui Tingkat capaian kinerja RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target Akhir RPJMD 2026</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	%	30,54	27,01	113,07%	Tercapai



<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target Akhir RPJMD 2026</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	64,14	93,40	68,67%	Akan Tercapai
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	1,12	0,07	1,600%	Belum Tercapai
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	70,94	81,50	87,04%	Akan Tercapai
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	90,64	83,24	108,89%	Tercapai

Perbandingan capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai dan bahkan melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Indikator **Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** menunjukkan capaian sebesar **113,45%**, melampaui target RPJMD, yang didukung oleh peningkatan manajemen lalu lintas serta pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan. Selain itu, indikator **Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan** dan **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** juga mencapai target RPJMD dengan capaian masing-masing **100,71%**.

Namun demikian, terdapat indikator yang belum mencapai target RPJMD, yaitu **Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Keselamatan** dengan capaian **63,24%**, serta **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** sebesar **70,95**. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kepatuhan operator angkutan serta perlunya penguatan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan kinerja.

Sementara itu, indikator **Persentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum dan Angkutan Barang** menunjukkan capaian yang sangat signifikan dibandingkan target RPJMD, sebagai hasil dari peningkatan pengawasan, penegakan aturan, serta penanganan titik rawan kecelakaan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan sejalan dengan target RPJMD. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan pada indikator yang belum tercapai melalui penguatan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja agar seluruh sasaran RPJMD dapat tercapai secara optimal.



### 3.4 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui posisi capaian kinerja Dinas Perhubungan secara Nasional, maka dilakukan perbandingan capaian dengan realisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Adapaun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Realisasi Nasional</b>
<b>Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	30,54	Tidak ada
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	63,24	Tidak ada
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	1,12	Tidak ada
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	70,94	Tidak ada
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,64	Tidak ada



### 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang **cukup baik**, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil **mencapai dan melampaui target** yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, namun masih terdapat pula kendala yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada beberapa indikator.

**Tabel 3.7**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang dilakukan**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	26,92	30,54	113,45 %	Target terlampaui. Peningkatan didukung oleh optimalisasi manajemen lalu lintas, penambahan rambu dan marka, serta penguatan koordinasi lintas sektor.	Mempertahakan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemeliharaan rutin, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan teknologi manajemen lalu lintas.
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar	%	91,30	63,24	69,27%	Target belum tercapai. Masih terdapat armada	Intensifikasi pembinaan dan pengawasan, penegakan uji KIR,



Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
berkeselamatan	pelayanan minimal keselamatan					yang belum memenuhi standar keselamatan akibat keterbatasan kepatuhan operator dan usia kendaraan.	serta pemberian sanksi dan insentif bagi operator angkutan.
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,07	1,12	1,528,57%	Capaian sangat tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya upaya pengawasan, penertiban ODOL, serta penanganan lokasi rawan kecelakaan.	Melanjutkan pengawasan terpadu, peningkatan sarana keselamatan jalan, serta edukasi keselamatan berkendara bagi pengemudi.
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	70,90	70,94	100,05%	Target tercapai. Program pembangunan dan pemeliharaan berjalan sesuai rencana.	Optimalisasi pemeliharaan dan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah serta prioritas keselamatan.
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	90,00	90,64	100,71%	Target terlampaui. Kualitas pelayanan meningkat seiring perbaikan SOP dan responsivitas petugas.	Peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi layanan, dan survei kepuasan masyarakat secara berkelanjutan



Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							n.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	73,55	70,95	96,46%	Target belum tercapai sepenuhnya akibat belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas dokumen SAKIP, dan pendampingan teknis.
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan	%	100	100	100%	Target tercapai. Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.	Mempertahankan capaian melalui evaluasi berkala dan pengembangan inovasi pelayanan.

### **1. Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh:

- Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan RPJMD.
- Meningkatnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan kepolisian dan OPD terkait dalam pengelolaan lalu lintas dan keselamatan jalan.



- Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, seperti rambu, marka jalan, dan penerangan jalan umum.
- Penguatan pengawasan dan pembinaan angkutan umum dan angkutan barang, termasuk uji kelaikan kendaraan (KIR).
- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan SOP dan peningkatan responsivitas aparatur, yang tercermin dari nilai IKM yang melampaui target.

## **2. Faktor Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja**

Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya beberapa indikator kinerja antara lain:

- Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian operator angkutan umum terhadap standar pelayanan minimal keselamatan.
- Keterbatasan anggaran untuk peremajaan sarana dan prasarana perhubungan.
- Kondisi geografis dan infrastruktur jalan di beberapa wilayah yang masih berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.
- Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang berdampak pada capaian nilai SAKIP.

## **3. Upaya Perbaikan**

Sebagai tindak lanjut atas faktor keberhasilan dan kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan akan:

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan umum dan angkutan barang.
- Memperkuat penegakan aturan keselamatan dan pengendalian kendaraan ODOL.



- Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan berbasis prioritas keselamatan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja melalui penguatan implementasi SAKIP.
- Mendorong inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perhubungan.

### **3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **A. Efisiensi sumber daya anggaran**

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang **cukup optimal**. Hal ini tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada prioritas utama, khususnya peningkatan pelayanan dan keselamatan sarana serta prasarana perhubungan. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, seperti peningkatan sarana keselamatan jalan, pengelolaan lalu lintas, serta pembinaan angkutan umum dan angkutan barang. Dengan strategi tersebut, sebagian besar indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan.

Upaya efisiensi juga dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada dilakukan secara efektif dengan meminimalkan kegiatan yang bersifat administratif dan mengoptimalkan belanja yang berorientasi pada hasil (outcome).



Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan efisiensi anggaran, khususnya dalam penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan akan terus mendorong peningkatan efisiensi penggunaan anggaran melalui penguatan pengendalian internal, evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 3.8**  
**Perhitungan atas Efisiensi Anggaran**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
<b>Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana Perhubungan</b>	<b>Indek layanan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	<b>26,92</b>	<b>30,54</b>	<b>113,45</b>	<b>1.888.987.500</b>	<b>1.876.653.876</b>	<b>99,35%</b>	<b>14,10%</b>
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	91,30	63,24	69,27%	811.442.500	809.919.600	99,61%	-30,54%
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,07	1,12	1.528,57 %	382.845.000	373.893.818	97,66%	1,507,5%
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	70,90	70,94	100,05%	694.700.000	692.840.458	99,73%	0,32%



Tujuan/Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,00	90,64	100,71%	4.674.800.458	4.440.142.003	94,98	5,73%

$$E = \frac{\sum ((PAKi \times Cki) - RAKi)}{\sum PAKi} \times 100\%$$

Dimana

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran

RAKi = realisasi anggaran

Cki = capaian kinerja

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara presentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran.

Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut :

- 1) Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- 2) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Anggaran atas perjanjian kinerja



Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran sebesar **Rp. 6.316.795.879,00,-** dari target belanja sebesar **Rp. 6.563.787.958,00,-** atau **96,24%**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 246.992.079,00.**

Hasil analisis presentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan presentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut :

**a. Tujuan Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan presentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan dikatakan **efisiensi** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 1.888.987.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.876.653.876,00 atau 94,98%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 234.658.455,00 sehingga presentase kinerja keuangan setelah efisiensi adalah sebesar 14,10%

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terdapat sisa anggaran barang jasa
- 2) Terdapat anggaran yang tidak bisa diserap

**b. Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan**

1. Hasil perbandingan antara presentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran dengan indikator Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan



untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 811.442.500,00 dari anggaran Rp. 809.919.600,00 atau 99,81%. Realisasi keuangan sebesar 99,81% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 70,94%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.522.900,00, sehingga persentase kinerja keuangan setelah efisiensi mencapai -30,54%

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terdapat sisa anggaran barang jasa
  - 2) Terdapat sisa anggaran untuk bagi hasil dengan Bapenda Provinsi dan Polres Pacitan dalam retribusi parkir di tepi jalan umum
2. Hasil perbandingan antara presentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran dengan indikator Presentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 373.893.818,00 dari anggaran Rp. 382.845.000,00 atau 97,66%. Realisasi keuangan sebesar 97,66% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 1,600%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.951.182,00, sehingga persentase kinerja keuangan setelah efisiensi mencapai 1.507,5%

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terdapat sisa anggaran barang jasa
  - 2) Terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan
3. Hasil perbandingan antara presentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran dengan indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana



perhubungan, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 692.840.458,00 dari anggaran Rp. 694.700.000,00 atau 99,73%. Realisasi keuangan sebesar 99,73% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,05%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.522.900,00, sehingga persentase kinerja keuangan setelah efisiensi mencapai 0,32%

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terdapat sisa anggaran barang jasa
- 2) Terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan

**c. Sasaran 2 Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal**

Hasil perbandingan antara presentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran dengan indikator Nilai IKM Perangkat Daerah, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.440.142.003,00 dari anggaran Rp. 4.674.800.458,00 atau 94,98%. Realisasi keuangan sebesar 94,98% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,71%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 234.658.455,00, sehingga persentase kinerja keuangan setelah efisiensi mencapai 5,73%

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terdapat sisa gaji PNS
- 2) Terdapat sisa anggaran barang dan jasa



## **B. Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Efisiensi sumber daya manusia merupakan kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aparatur yang tersedia untuk mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan tepat guna. Analisis efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan membandingkan antara jumlah dan kompetensi pegawai yang ada dengan beban kerja serta capaian kinerja program dan kegiatan.

Pada pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya manusia telah diupayakan secara optimal melalui pembagian tugas yang proporsional, penyesuaian tugas sesuai kompetensi, serta peningkatan koordinasi antarbidang. Dengan keterbatasan jumlah aparatur, pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan penambahan kebutuhan pegawai secara signifikan.

Selain itu, efisiensi sumber daya manusia juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penjadwalan kerja yang efektif sehingga mampu mengurangi beban kerja yang tumpang tindih. Hal ini berdampak pada tercapainya output kegiatan dengan penggunaan sumber daya manusia yang relatif tetap, bahkan cenderung lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya manusia pada tahun pelaporan telah mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara optimal dengan tingkat efisiensi yang baik.



**Tabel 3.9**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

NO	PEGAWAI	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	35 orang	31 orang	4 orang
2	PPPK Penuh Waktu	3 orang	2 orang	1 orang
3	PPPK Paruh Waktu	13 orang	12 orang	1 orang
4	Jasa Teknis	4 orang	2 orang	2 orang
<b>TOTAL</b>		<b>55 orang</b>	<b>47 orang</b>	<b>8 orang</b>

Tabel 3.9 Disampaikan rincian data Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Berdasarkan Pangkat**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	7 orang	6 orang	1 orang
3	Golongan III	23 orang	20 orang	3 orang
4	Golongan IV	5 orang	5 orang	-
5	Golongan X	1 orang	-	1 orang
6	Golongan V	2 orang	2 orang	-
<b>TOTAL</b>		<b>38 orang</b>	<b>33 orang</b>	<b>5 orang</b>

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Eselon II	1 orang	1 orang	-
2	Eselon III	4 orang	4 orang	-



NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
3	Eselon IV	2 orang	2 orang	-
4	Jabatan Fungsional	4 orang	3 orang	1 orang
5	Jabatan Fungsional Tertentu	9 orang	8 orang	1 orang-
5	Jabatan Fungsional Umum	18 orang	18 orang	3 orang
<b>TOTAL</b>		<b>38 orang</b>	<b>33 orang</b>	<b>5 orang</b>

**Tabel 3.12**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Strata 2 (Magister)	7 orang	6 orang	1 orang
2	Strata 1 (Sarjana)	8 orang	6 orang	2 orang
3	Diploma 3	3 orang	2 orang	1 orang
4	SLTA	20 orang	19 orang	1 orang
<b>TOTAL</b>		<b>38 orang</b>	<b>33 orang</b>	<b>5 orang</b>

### **Analisis Efisiensi Anggaran Ditinjau dari Sumber Daya Manusia**

Efisiensi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ditinjau dari aspek sumber daya manusia menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung oleh jumlah dan komposisi pegawai yang relatif memadai. Dengan total **38 pegawai**, mayoritas berada pada **Golongan III (60,5%)**, yang merupakan golongan produktif dan menjadi pelaksana utama kegiatan teknis maupun administratif.

Dominasi pegawai pada golongan menengah tersebut berdampak positif terhadap efisiensi anggaran, karena pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada tenaga eksternal atau pihak ketiga, sehingga menekan biaya operasional. Selain itu, tidak adanya pegawai pada



Golongan I menunjukkan bahwa struktur SDM telah berada pada tingkat kompetensi yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

Jumlah pegawai pada **Golongan IV yang terbatas (13,2%)** juga berkontribusi terhadap efisiensi belanja pegawai, khususnya terkait tunjangan jabatan dan beban biaya struktural, namun di sisi lain menuntut optimalisasi peran pejabat senior dalam fungsi pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. Kondisi ini mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif melalui pola kerja kolektif dan pemanfaatan sumber daya internal.

Dari sisi gender, dominasi pegawai laki-laki (**86,8%**) sejalan dengan karakteristik tugas Dinas Perhubungan yang banyak bersifat lapangan, sehingga alokasi anggaran untuk penyesuaian tugas dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, keterbatasan jumlah pegawai perempuan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan SDM jangka menengah agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan prinsip kesetaraan dan keberlanjutan organisasi.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran berbasis sumber daya manusia telah tercapai melalui pemanfaatan SDM internal secara maksimal, pengendalian belanja pegawai struktural, serta penyesuaian jumlah dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan program dan kegiatan. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang tepat sasaran dan pengembangan kompetensi diharapkan mampu semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.



### **3.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian pernyataan kinerja perangkat daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat sasaran, didukung oleh perencanaan yang matang, ketersediaan anggaran, serta sumber daya manusia yang memadai, mampu menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja. Program yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung oleh program/kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemenuhan indikator kinerja utama. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, pengelolaan anggaran yang efisien, serta koordinasi antarbidang yang baik menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya target kinerja bahkan melampaui yang direncanakan.

Namun demikian, terdapat pula beberapa program/kegiatan yang belum sepenuhnya mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan atau regulasi, keterbatasan anggaran, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan situasi nonteknis lainnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang mengalami penyesuaian jadwal berdampak pada belum optimalnya realisasi output dan outcome yang diharapkan.

Secara umum, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah. Evaluasi atas keberhasilan dan kendala pelaksanaan menjadi



dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pada periode berikutnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yang dalam urusan pemerintahan dibidang perhubungan terdiri dari 2 program yaitu :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025 Tujuan, Sasaran dan Program**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,95	4.674.800.458	
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen	76.692.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	3.755.329.697	
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	86.184.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	319.939.631	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	15.000,00	



Program/Kegiatan	Indikator	Besaran/Volume	Anggaran	Keterangan
	Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	348.678.430	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	87.961.700	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan</b>	<b>100%</b>	<b>1.888.987.500</b>	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1561 titik	245.730.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	4 unit	198.940.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan	811.412.500	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit	232.400.000	



Program/Kegiatan	Indikator	Besaran/Volume	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa	2 kegiatan	250.030.000	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 kegiatan	15.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 kegiatan	147.445.000	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	1 kegiatan	3.000.000	

Berdasarkan Tabel 3.13, pencapaian kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan didukung oleh dua program utama, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dan **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**. Kedua program tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berperan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan kinerja internal perangkat daerah. Indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** tercapai dengan nilai **70,95**, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik.



Beberapa kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan capaian 23 dokumen perencanaan dan laporan kinerja, berkontribusi terhadap tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan penyusunan 59 dokumen laporan keuangan dan dukungan anggaran terbesar, menjadi faktor utama dalam menjaga akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan program.
- **Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yang seluruh indikatornya tercapai **100%**, mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kualitas pelayanan internal.
- **Penyediaan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**, turut memastikan ketersediaan sarana kerja dan kondisi aset dalam keadaan layak guna.

Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **berhasil menunjang pencapaian pernyataan kinerja**, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan dukungan administrasi perangkat daerah.

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program Penyelenggaraan LLAJ merupakan program utama yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan peningkatan pelayanan dan keselamatan perhubungan. Indikator **Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan** tercapai **100%**, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.



Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**, dengan realisasi pada **1.561 titik**, memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**, dengan peningkatan sarana dan prasarana pada 4 unit terminal, mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
- **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**, melalui penyediaan 9 unit alat uji, meningkatkan kelaikan kendaraan dan keselamatan angkutan.
- **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**, sebanyak 130 kegiatan, menjadi faktor penting dalam menekan potensi kecelakaan lalu lintas.
- **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**, yang dilaksanakan dalam 3 kegiatan, berkontribusi terhadap pengaturan dan pengendalian lalu lintas di jaringan jalan kabupaten.

### **3. Program/Kegiatan yang Belum Optimal**

Meskipun sebagian besar indikator tercapai, terdapat beberapa kegiatan yang kontribusinya belum optimal terhadap peningkatan kinerja secara signifikan, antara lain:

- **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Persetujuan Hasil Andalalin**, yang bersifat perencanaan dan koordinasi, dampaknya belum dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek.
- Keterbatasan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan strategis menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah pelayanan.



## **Kesimpulan**

Secara umum, program dan kegiatan pada Tahun 2025 **telah berhasil menunjang pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perhubungan**. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memberikan dukungan kuat terhadap aspek tata kelola dan akuntabilitas, sedangkan Program Penyelenggaraan LLAJ memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan keselamatan perhubungan. Adapun kegiatan yang belum optimal menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

**Tingkat keberhasilan atas capaian kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

### **A. Nilai Sakip Perangkat Daerah**

Berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang di terbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan nomor 700.1.2.1/LHE-11/408.49/2025, tanggal 28 Mei 2025, memperoleh nilai sebesar **70,95** dengan kategori **BB (sangat baik)**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implemnetasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan

Sebagai Upaya pencapaian kinerja tersebut, maka program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan 7 kegiatan meliputi :



1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 76.692.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 76.245.217,00. Sehingga pencapaian adalah 99,42%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	23	23

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target 23 dokumen terealisasi 23 dokumen sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 55.172.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 55.045.362,00 sehingga pencapaian adalah 99.77%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja Sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 9 dokumen sehingga pencapaian adalah 9 dokumen sehingga pencapaian adalah 100%

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan

Target keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.520.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.199.855,00 sehingga pencapaian adalah 98.51%



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	14	100

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 14 laporan terealisasi 14 laporan sehingga pencapaian adalah 100%

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 3.755.329.697,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.548.287.325 Sehingga pencapaian adalah 94,49%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Laporan	59	59	100

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah dengan target 59 laporan terealisasi 59 laporan sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.740.109.697,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.533.070.325,00 sehingga pencapaian adalah 94.46%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38	38	100

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah dengan target 38 orang terealisasi 38 orang sehingga pencapaian adalah 100%



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

dengan target 45 dokumen

Target keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.220.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.217.000,00 sehingga pencapaian adalah 99.98%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	45	45	100

Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. dengan target 45 laporan terealisasi 45 laporan sehingga pencapaian adalah 100%

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target capaian kinerja 100%

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 86.184.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 86.034.000,00 Sehingga pencapaian adalah 99,83%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100	100	100



Indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 86.184.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 86.034.000,00 Sehingga pencapaian adalah 99,83%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100

Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, dengan target 3 paket terealisasi 3 paket sehingga pencapaian adalah 100%

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 319.939.631,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 319.542.984,00 Sehingga pencapaian adalah 99,83%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100

Indikator Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 6.513.200,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.496.400,00 Sehingga pencapaian adalah 99,74%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100

Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target 2 paket terealisasi 2 paket sehingga pencapaian adalah 100%

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 156.848.901,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 156.755.834,00 Sehingga pencapaian adalah 99,94%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100

Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target 5 paket terealisasi 5 paket sehingga pencapaian adalah 100%

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 110.129.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 110.100.000,00 Sehingga pencapaian adalah 99,97%



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100

Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan target 2 paket terealisasi 2 paket sehingga pencapaian adalah 100%

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 46.448.530,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.190.750,00 Sehingga pencapaian adalah 99,45%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100

Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga pencapaian adalah 100%

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	100	0	0



Indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dengan target 100% terealisasi 0% sehingga pencapaian adalah 0%

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0

Indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, dengan target 1 unit terealisasi 0 unit sehingga pencapaian adalah 0%

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 348.678.430,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 325.666.629,00 Sehingga pencapaian adalah 93,40%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100	100	100

Indikator Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 142.496.830,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 139.294.703,00 Sehingga pencapaian adalah 97,75%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100

Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga pencapaian adalah 100%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 206.181.600,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 186.371.926,00 Sehingga pencapaian adalah 90,39%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100

Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga pencapaian adalah 100%.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 87.961.700,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 84.365.848,00 Sehingga pencapaian adalah 95,91%



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80	80	100

Indikator Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik, dengan target 80% terealisasi 80% sehingga pencapaian adalah 100%

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 87.946.700,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 84.365.848,00 Sehingga pencapaian adalah 95,93%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	100

Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dengan target 16 unit terealisasi 16 unit sehingga pencapaian adalah 100%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1	0	0



Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
---	--	--	--	--

Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 unit terealisasi 0 unit sehingga pencapaian adalah 0%.



Gambar 3.1 Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

**B. Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan**

Kegiatan pendukung program urusan perhubungan meliputi :

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target capaian kinerja 1 dokumen

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0

Indikator Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen terealisasi 0 dokumen sehingga pencapaian adalah 0%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota



Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Unit	1	0	0

Indikator Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen terealisasi 0 dokumen sehingga pencapaian adalah 0%.

- 2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 245.730.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 245.538.075,00 Sehingga pencapaian adalah 99,92%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	unit	1087	1561	143.60%

Indikator Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan target 1087 unit terealisasi 1561 unit sehingga pencapaian adalah 143,60%.

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 60.120.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 59.986.620,00 Sehingga pencapaian adalah 99,78%



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	41	41	100

Indikator Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun, dengan target 41 unit terealisasi 41 unit sehingga pencapaian adalah 100%.

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 185.610.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 185.551.455,00 Sehingga pencapaian adalah 99,97%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	600	1520	253,33

Indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, dengan target 600 unit terealisasi 1520 unit sehingga pencapaian adalah 253,33%.

3) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 198.940.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 198.130.859,00 Sehingga pencapaian adalah 99,59%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Unit	4	4	100



Indikator Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan target 4 unit terealisasi 4 unit sehingga pencapaian adalah 100%.

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang  
Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 120.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	0	0

Indikator Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, dengan target 1 unit terealisasi 0 unit sehingga pencapaian adalah 0,00%.

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)  
Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 198.820.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 198.130.859,00 Sehingga pencapaian adalah 99,65%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	5	5	100

Indikator Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara, dengan target 5 unit terealisasi 5 unit sehingga pencapaian adalah 100%.



4) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 811.412.500,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 809.919.600,00 Sehingga pencapaian adalah 99,82%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	kegiatan	1	1	100

Indikator Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dengan target 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan sehingga pencapaian adalah 100%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 811.412.500,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 809.919.600,00 Sehingga pencapaian adalah 99,82%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100

Indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota,



dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga pencapaian adalah 100%.

5) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 232.400.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 226.700.618,00 Sehingga pencapaian adalah 97,55%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Unit	9	9	100

Indikator Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian, dengan target 9 unit terealisasi 9 unit sehingga pencapaian adalah 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 69.500.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 69.231.688,00 Sehingga pencapaian adalah 99,61%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	3500	3722	106,34%

Indikator Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target 3500 dokumen terealisasi 3722 dokumen sehingga pencapaian adalah 106,34%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 162.900.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub



kegiatan tersebut sebesar Rp. 157.468.930,00 Sehingga pencapaian adalah 96,67%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	100%

Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, dengan target 9 unit terealisasi 9 unit sehingga pencapaian adalah 100%.

6) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 250.030.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 249.171.524,00 Sehingga pencapaian adalah 99,66%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah manajemen dan rekayasa	Kegiatan	2	2	100

Indikator Jumlah manajemen dan rekayasa, dengan target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan sehingga pencapaian adalah 100%.

a. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	laporan	1	0	0



Indikator Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi, dengan target 1 laporan terealisasi 0 laporan sehingga pencapaian adalah 0%.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 250.015.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 249.171.524,00 Sehingga pencapaian adalah 99,66%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	3	3	100%

Indikator Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan, dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen sehingga pencapaian adalah 100%.

- 7) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kegiatan	1	0	0

Indikator Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan target 1 kegiatan terealisasi 0 kegiatan sehingga pencapaian adalah 0%.



- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 15.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 0,00 Sehingga pencapaian adalah 0,00%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	1	0	0

Indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan target 1 laporan terealisasi 0 laporan sehingga pencapaian adalah 0%.

- 8) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 147.445.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 144.193.200,00 Sehingga pencapaian adalah 97,79%

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Laporan	130	132	101,53

Indikator Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan, dengan target 130 laporan terealisasi 132 laporan sehingga pencapaian adalah 101,53%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 147.445.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 144.193.200,00 Sehingga pencapaian adalah 97,79%



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja sub kegiatan adalah Peningkatan Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12	12	100

Indikator Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga pencapaian adalah 100%.

9) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari kegiatan tersebut adalah Rp. 3.000.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 Sehingga pencapaian adalah 100%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator kinerja kegiatan adalah Peningkatan Jumlah Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kegiatan	1	1	100

Indikator Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan, dengan target 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan sehingga pencapaian adalah 100%.

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Keuangan dari sub kegiatan tersebut adalah Rp. 3.000.000,00 sedangkan realisasi keuangan dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 Sehingga pencapaian adalah 100%



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Indikator kinerja sub kegiatan adalah Peningkatan Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100

Indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga pencapaian adalah 100%.



Gambar 3.2 Pemeliharaan Rambu, Warning Light dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah



Gambar 3.3 Pemasangan Meterisasi dan Pemeliharaan PJU Kabupaten Pacitan



Gambar 3.4 Pengamanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas, Pengamanaan Natal & Tahun Baru dan Apel Patuh Semeru 2025



Gambar 3.5 Pengujian Kendaraan Bermotor

### 3) REALISASI ANGGARAN

Evaluasi realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dilakukan untuk anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 3.170.629.000 dengan realisasi 3.162.728.000 atau 99,75%. Dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Keseluruhan pendapatan di Dinas Perhubungan bersumber pada pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Rincian retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.14**  
**Realisasi PAD**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

Uraian	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>3.170.629.000</b>	<b>3.162.728.000</b>	<b>-7.9010.00</b>	<b>99,75</b>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.062.259.000	3.053.436.000	-8.823.000	99,71
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	58.330.000	59.128.000	798.000	101,37
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	44.788.000	44.822.000	34.000	100,08
Pemanfaatan Aset Daerah	5.252.000	5.342.000	90.000	101,71

b. Pagu anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar **Rp 6.563.787.958,00** dengan realisasi sebesar **6.316.795.879,00** atau **96,24%**. Belanja Dinas Perhubungan meliputi :

- Belanja Operasi Rp 6.426.683.958,00
- Belanja Modal Rp 137.104.000,00

Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Desember Rp</b>	<b>Sisa Anggaran Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.563.787.958</b>	<b>6.316.795.879</b>	<b>246.992.079</b>	<b>96,24</b>
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>	<b>6.563.787.958</b>	<b>6.316.795.879</b>	<b>246.992.079</b>	<b>96,24</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.674.800.458</b>	<b>4.440.142.003</b>	<b>234.658.455</b>	<b>94,98</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.692.000</b>	<b>76.245.217</b>	<b>446.783</b>	<b>97,49</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.172.000	55.045.362	126.638	99,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.520.000	21.199.855	320.145	98,51
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.755.329.697</b>	<b>3.548.287.325</b>	<b>207.042.372</b>	<b>94,49</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.740.109.697	3.533.070.325	207.039.372	94,46



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.220.000	15.217.000	3.000	99,98
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>86.184.000</b>	<b>86.034.000</b>	<b>150.000</b>	<b>99.83</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.184.000	86.034.000	150.000	99.83
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>319.939.631</b>	<b>319.542.984</b>	<b>396.647</b>	<b>99.88</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.513.200	6.496.400	16.800	99.74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.848.901	156.755.834	93.067	99.94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.129.000	110.100.000	29.000	99.97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.448.530	46.190.750	257.780	99.45
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>348.678.430</b>	<b>325.666.629</b>	<b>23.011.801</b>	<b>93.40</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.496.830	139.294.703	3.202.127	97.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.181.600	186.371.926	19.809.674	90.39
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.961.700</b>	<b>84.365.848</b>	<b>3.595.852</b>	<b>95.91</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.946.700	84.365.848	3.580.852	95.93
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
dan Bangunan Lainnya				
<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.888.987.500</b>	<b>1.876.653.876</b>	<b>12.333.624</b>	<b>99.35</b>
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	15.000,00	0.00	15.000,00	0,00
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>245.730.000</b>	<b>245.538.075</b>	<b>191.925</b>	<b>99.92</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	60.120.000	59.986.620	133.380	99.78
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	185.610.000	185.551.455	58.545	99.97
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>198.940.000</b>	<b>198.130.859</b>	<b>809.141</b>	<b>99.59</b>
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	120.000	0	120.000	0



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	198.820.000	198.130.859	689.141	99.65
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>811.412.500</b>	<b>809.919.600</b>	<b>1.492.900</b>	<b>99.82</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	811.412.500	809.919.600	1.492.900	99.82
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>232.400.000</b>	<b>226.700.618</b>	<b>5.699.382</b>	<b>97.55</b>
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.500.000	69.231.688	268.312	99.61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	162.900.000	157.468.930	5.431.070	96.67
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</b>	<b>250.030.000</b>	<b>249.171.524</b>	<b>858.476</b>	<b>99.66</b>



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
<b>Kabupaten/Kota</b>				
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15.000,00	0.00	15.000,00	0,00
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	250.015.000	249.171.524	858.476	99.66
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	15.000,00	0.00	15.000,00	0,00
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0.00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15.000,00	0.00	15.000,00	0.00
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>147.445.000</b>	<b>144.193.200</b>	<b>3.251.800</b>	<b>97.79</b>
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	147.445.000	144.193.200	3.251.800	97.79



<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Desember Rp</b>	<b>Sisa Anggaran Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 terdapat 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 meliputi sasaran – sasaran :

**Sasaran 1** : Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan dengan indikator :

- a. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan Capaiannya 69,27% dengan realisasi 63,24% dari target 91,30%.
- b. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang capainya 1.528,57% dengan realisasi 1,07% dari target 0,07%. Tantangan dalam proses pencapaian kinerja yaitu tingginya persaingan antara angkutan online dengan angkutan umum, hal ini yang menyebabkan turunnya minat pengusaha angkutan umum untuk memperpanjang ijin kelayakan kendaraan.
- c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan capaiannya 100,05% dengan realisasi 70,94% dari target 70,90%, hal ini menunjukkan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di terminila tipe C.

Sasaran tersebut didukung oleh 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



**sasaran 2** : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal capaiannya 100,71% dengan realisasi 90,64 dari target 90,00. Sasaran tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dari capaian sasaran strategis maupun indikator kinerja yang sudah dilaksanakan, Dinas Perhubungan masih perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada setiap target indikator yang akan dicapai pada setiap tahunnya

- Program – program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas
- Lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran dengan memperhatikan agenda kegiatan ataupun kendala yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan.
- Peningkatan mutu pelayanan publik baik dari sisi manajemen dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik

Pacitan, Januari 2026

**KEMALIA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**Ir. BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt., M.M, IPU**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680920 199901 1 001



# LAMPIRAN